

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Fenomena perubahan iklim menjadi salah satu isu internasional yang kerap diperbincangkan yang juga berkaitan erat dengan ilmu Hubungan Internasional. Hal tersebut disebabkan perubahan iklim yang dapat berdampak negatif bagi keberlangsungan suatu negara, khususnya pada stabilitas perekonomian maupun terhadap lingkungan. Perubahan iklim umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia dalam rangka industrialisasi, sehingga negara maju seringkali menjadi pelaku sekaligus korban dari adanya fenomena perubahan iklim. Akhir-akhir ini bahkan Indonesia sedang mengalami akibat dari perubahan iklim dimana suhu udara naik dan membuat udara terasa sangat panas. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan karena bisa berdampak buruk terhadap kesehatan dan juga sektor lain. Selain Indonesia, salah satu negara dengan permasalahan perubahan iklim yang cukup menarik untuk dibahas adalah Islandia karena bias dibilang kedua negara ini mempunyai iklim yang berbeda dan cukup kontras namun dapat berakibat sama jika terdampak adanya perubahan iklim global.

Islandia merupakan negara yang terliput es dan salju. Akibat dari perubahan iklim, es yang ada di Islandia sebagian mencair dan membuat warga Islandia semakin khawatir akan jangka panjang yang akan mereka alami. Sehingga, Islandia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) demi meminimalisir pemanasan global yang berdampak pada perubahan iklim dunia. Dalam hal ini UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) mewadahi komitmen Islandia karena konvensi ini merupakan konvensi penanganan perubahan iklim skala global. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat topik Komitmen Islandia sebagai Anggota UNFCCC dalam Menangani Masalah Perubahan Iklim yang berkaitan dengan masalah lingkungan dan juga stabilitas ekonomi.

1.2 Latar Belakang

Pada era modern, isu lingkungan hidup merupakan topik hangat dalam ranah hubungan internasional. Topik tersebut marak diperbincangkan dengan adanya proses industrialisasi yang dilakukan oleh negara-negara maju maupun berkembang dalam rangka memajukan perekonomian negara serta untuk kepentingan negaranya, namun sebagai dampaknya, proses industrialisasi menghasilkan peningkatan emisi gas rumah kaca, yang apabila tidak diperhatikan dapat membahayakan lingkungan. Dalam kajian ilmu Hubungan Internasional, isu lingkungan juga menjadi salah satu topik yang sering diperbincangkan. Dalam kaitannya dengan industrialisasi, banyak juga isu-isu lingkungan yang marak terjadi, salah satunya ialah perubahan iklim.

Pemanasan Global merupakan suatu kecacatan dari ekosistem bumi yang disebabkan oleh lonjakan suhu atmosfer, laut serta daratan. Lonjakan suhu bumi tersebut diakibatkan oleh tingginya persentasi emisi gas rumah kaca. Mayoritas penyebab naiknya emisi gas rumah kaca tersebut yaitu adanya pembakaran bahan bakar fosil, kebakaran serta gundulnya hutan (Utina, 2009). Pada dasarnya, panas sinar matahari yang diterima bumi seharusnya dilepaskan kembali ke atmosfer bumi. Namun, apabila terjadi perubahan iklim dengan meningkatnya emisi gas rumah kaca, pelepasan energi panas bumi menjadi lebih lama dan yang seharusnya segera dilepaskan menjadi terjebak di atmosfer bumi, atau biasa disebut dengan pemanasan global. Menurut Utina (Utina, 2009) Pemanasan Global telah berakibat terhadap ekosistem yang tidak normal yang membuat banyak perubahan pola seperti perubahan iklim yang melonjak, pencairan es, yang kemudian membuat permasalahan baru. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa bila terjadi pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim, gejala-gejala yang dapat berdampak negatif bagi keberlangsungan suatu negara dapat terjadi. Oleh sebab itu, banyak negara yang menjadikan perubahan iklim sebagai fenomena krusial yang harus ditangani demi keberlangsungan negaranya. Berangkat dari berbagai aspek negatif dari fenomena perubahan iklim di atas, banyak negara yang mulai mengusulkan pembentukan organisasi pemerintah yang

diharapkan dapat mengurangi kerugian serta dampak buruk akibat dari pemanasan global dengan menetapkan kebijakan- kebijakan yang mendukung hal tersebut. Oleh karena itu pada tahun 1988 dibentuklah sebuah organisasi IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Ditahun yang sama pula, untuk pertama kalinya Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (MU PBB) mengangkat isu mengenai perubahan iklim di Malta dengan tujuan agar mata dunia mulai memperhatikan mengenai masalah perubahan iklim tersebut. (Elliot, 2004, p. 82)

Pada tahun 1990, di Jenewa, saat *Ministerial Declaration of the Second World Climate Conference* dilaksanakan, IPCC mengangkat isu mengenai perubahan iklim. Melalui penelitiannya yang di paparkan ketika konferensi berlangsung, IPCC menegaskan bahwa akibat dari perubahan iklim yang terjadi akan mengancam dunia jika tidak di hentikan. Oleh karena itu, IPCC menegaskan bahwa untuk meminimalisir hal tersebut di perlukan kerjasama dari setiap negara untuk mencegah peningkatan yang ekstrim dari perubahan iklim tersebut. Hasil penelitian dari IPCC tersebut berkontribusi besar terhadap perhatian masyarakat global atas perubahan iklim yang dianggap fiktif di era tersebut. Melalui momentum penelitian IPCC tersebut, PBB membentuk suatu komite yang ditujukan sebagai wadah untuk mendukung negosiasi dari setiap negara mengenai isu perubahan iklim yaitu UNFCCC. Pada tahun 1992, diadakan KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) Bumi di Rio de Janeiro, UNFCCC kemudian dibentuk dengan tujuan untuk menangani masalah perubahan iklim global yang kian meningkat. (UNFCCC Secretariat, 2006, pp. 16-17)

UNFCCC sebagai konvensi kerangka kerja yang dinaungi oleh PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) mempunyai bagian penting dalam mewadahi negara-negara yang ingin meminimalisir dampak perubahan iklim negaranya. Sehingga UNFCCC menetapkan beberapa prinsip dasar yang patut diterapkan oleh negara-negara yang tergabung dalam konvensi ini. Melalui konvensinya (UNFCCC, 1992), terbentuk prinsip-prinsip yang kemudian menjadi dasar bagi kebijakan-kebijakan UNFCCC. Hal tersebut disusun dengan memperhatikan tujuan-tujuan UNFCCC, sebagai berikut:

1. Prinsip pertama adalah setiap negara anggota UNFCCC memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga sistem iklim agar memiliki manfaat bagi generasi selanjutnya, namun dengan cara atau tanggungjawab yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan negaranya. Hal ini didasari kemampuan teknologi dan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang yang pastinya berbeda dalam hal mengatasi perubahan iklim, namun negara berkembang yang menjadi anggota UNFCCC harus menjadi pelopor dalam penanggulangan dampak-dampak perubahan iklim.
2. Prinsip kedua adalah setiap negara-negara berkembang anggota UNFCCC yang masih berjuang dalam pertumbuhan ekonominya harus mendapat perhatian khusus dalam proses penanggulangan perubahan iklim. Negara-negara tersebut harus mendapat bantuan, khususnya dalam hal finansial agar mampu menyesuaikan diri dengan tanggungjawab yang dibebankan oleh Konvensi UNFCCC.
3. Prinsip ketiga adalah setiap negara anggota UNFCCC harus mengambil tindakan pencegahan untuk mengantisipasi dan meminimalisir hal-hal yang memicu terjadinya perubahan iklim, serta menangani dampak-dampaknya dengan mempertimbangkan biaya yang digunakan dan memastikan keuntungan secara global dengan biaya sekecil-kecilnya. Dalam hal ini, perlu diperhatikan juga bahwa kebijakan yang diberlakukan untuk suatu negara harus mempertimbangkan keadaan social-ekonomi negara tersebut secara komprehensif.
4. Prinsip keempat adalah negara-negara anggota UNFCCC memiliki kewajiban untuk mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan. Prinsip ini menyatakan bahwa kebijakan yang diambil UNFCCC untuk menjaga system iklim harus sesuai dengan kondisi negara anggotanya dan berhubungan dengan program pembangunan nasional negara tersebut. Perlu diperhatikan juga bahwa perkembangan ekonomi dari negara anggota harus dipertimbangkan saat memutuskan langkah pencegahanperubahan iklim dari negara tersebut.

- Prinsip kelima adalah negara-negara anggota UNFCCC harus kooperatif dalam mempromosikan sistem Ekonomi Internasional yang suportif dan transparan, agar terbentuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya di negara berkembang, sehingga mereka mampu menangani perubahan iklim dengan lebih baik. (UNFCCC Secretariat, 2006, pp. 16-17).

Penulis memilih salah satu negara maju dengan permasalahan perubahan iklim yang cukup signifikan dalam UNFCCC, yaitu Islandia. Sebelumnya, Islandia mengalami kesulitan bahkan kelaparan akibat adanya perubahan suhu dan cuaca yang diakibatkan oleh perubahan iklim yang ekstrim. Perubahan iklim membawa Islandia untuk turut mencapai tujuan dari Konvensi kerja PBB dalam hal perubahan iklim. Dalam hal ini UNFCCC menjadi salah satu wadah bagi Islandia untuk menurunkan tingkat emisi karbon gas efek rumah kaca agar dapat meminimalisir pola perubahan iklim secara drastis.

Islandia terletak di Atlantik Utara antara Norwegia, Skotlandia dan Greenland. Dan merupakan pulau terbesar kedua di Eropa dan terbesar ketiga di Samudra Atlantik. Secara geologis, Daratan Islandia masih sangat muda dan masih dalam proses pembentukan, akibat banyaknya pegunungan berapi dan gletser di wilayahnya. Erosi glasial merupakan faktor utama dalam pembentukan daratan Islandia. Hal ini menunjukkan bahwa faktor utama dalam pembentukan Islandia ialah air, sehingga Islandia sangat menggantungkan keberlangsungan negaranya terhadap sektor tersebut dengan kekayaan sumber daya maritim seluas 758,000-km², bahkan diperkirakan ada sekitar 270 spesies ikan yang telah ditemukan di perairan Islandia (The Ministry for the Environment in Iceland, 2006).

Melalui kekayaan sumber daya maritime tersebut, Islandia menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu sumber pendapatan negaranya, bahkan sektor perikanan menyumbang 40% dari pendapatan ekspor negaranya. (Central Intelligence Agency) Islandia bahkan masuk kedalam 19 besar negara perikanan terbesar di dunia, sehingga membuat Islandia menjadi negara pengekspor ikan yang cukup melimpah. Dari pengeksporan itulah Islandia menggantungkan

perekonomian negaranya dan menjadikan perikanan sebagai salah satu tulang punggung untuk pendapatan negara dan masyarakatnya. Disisi lain, Islandia turut menghasilkan emisi dari produksi metal yang menyebabkan emisi ialah ferroalloys, yang menghasilkan emisi CO₂ dari proses pembakaran batu bara (The Environment Agency of Iceland, 2020). Melihat demikian besarnya kapasitas industri Islandia dan potensi emisi gas yang dihasilkan, dapat dikatakan bahwa negara tersebut merupakan negara penghasil emisi gas yang besar.

Islandia termasuk dalam negara Annex I, yaitu negara yang turut menyumbangkan gas rumah kaca yang diakibatkan oleh kegiatan industri. (The Ministry for the Environment in Iceland, 2006) Emisi yang dihasilkan Islandia periode 1990 dan 2018 dapat dihitung secara rata-rata dengan LULUCF (Land Use, Land-Use Change Forestry) sebagai penyumbang emisi terbesar jika dibandingkan dengan jumlah dari sektor-sektor lain. Hal tersebut diakibatkan oleh proses industrialisasi Islandia dalam hal produksi aluminium yang memakan intensitas energi sangat banyak. Selanjutnya emisi gas rumah kaca juga meningkatkurang lebih sepertiga jika dibandingkan dari tahun 1990 ke tahun 2018. (The Environment Agency of Iceland, 2020)

Islandia berkomitmen untuk mencapai netralisasi karbon sebelum tahun 2040, juga bertujuan untuk mengurangi 40% emisi gas rumah kaca di tahun 2030. Sehingga Islandia perlu beradaptasi perubahan iklim yang sedang dihadapi mengingat Islandia sebagai negara yang di liputi es dan salju tentu akan memperoleh dampak yang signifikan bila terkena perubahan iklim yang semakin ekstrim yang dapat menyebabkan es mencair sehingga dapat merusak ekosistem yang sudah ada. Jika es mencair tentu ekosistem didalamnya akan terganggu serta perubahan iklim dapat berakibat pada terjadinya bencana alam.

Dari pernyataan diatas, bisa dibayangkan bagaimana ruginya Islandia apabila perubahan Iklim melanda negaranya yang pada dasarnya mempunyai ikan yang melimpah. Jika Perubahan Iklim secara ganas melanda negara ini, masyarakat akan merasakan dampaknya yang dapat merugikan mereka secara fisik maupun finansial. Negara ini pun mungkin akan mengalami penurunan dalam kestabilan perekonomian maupun dalam segi keamanan nasional.

Menyadari hal tersebut, Islandia berkomitmen kepada UNFCCC untuk bersedia melakukan berbagai upaya guna menekan angka emisi negaranya. Dalam hal ini, Islandia termasuk kedalam Non-compliance due to incapacity yang disebabkan karena keterbatasan suatu aktor yang dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan seperti finansial, teknologi maupun sumber lainnya. Sehingga Islandia dapat dikatakan tidak patuh terhadap perjanjian yang telah ditetapkan dan ditandatangani sebelumnya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis mengambil rumusan masalah yaitu, bagaimana upaya islandia dalam memenuhi komitmennya terhadap UNFCCC tahun 2015-2021 dalam sektor ekonomi-lingkungan ditengah dorongan industrialisasi dalam negeri ?.

1.4 Tujuan Penelitian

Tulisan ini disusun untuk mencapai beberapa tujuan, antara lain:

1. Menjelaskan sebab akibat perubahan iklim bagi Islandia.
2. Menjelaskan bagaimana upaya Islandia sebagai bentuk komitmennya kepada UNFCCC terhadap penanggulangan masalah perubahan iklim disektor lingkungan dan ekonomi.
3. Menjelaskan hasil dari komitmen Islandia terhadap UNFCCC.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dibidang pendidikan juga bagi pembaca yang ingin mengetahui tentang dampak perubahan iklim bagi Islandia.

1. Tulisan ini diharapkan dapat membantu menjelaskan mengenai dampak perubahan iklim terhadap lingkungan serta terhadap perkembangan ekonomi.
2. Serta sebagai pustaka guna membantu peneliti berikutnya untuk memahami isu Perubahan Iklim dalam sudut pandang ilmu Hubungan

Internasional serta menjadi bahan bagi peneliti berikutnya jika ingin mengambil tema mengenai perubahan iklim, Islandia maupun UNFCCC.

3. Membantu pembaca untuk mengetahui tentang pendekatan Mitchell yang digunakan sebagai teori dalam penelitian ini.

1.6 Sistematika Penelitian

Skripsi ini tersusun oleh 5 bab dan terbagi lagi menjadi beberapa bagian sub-bab dengan masing-masing topik.

1. Bab I mengenai pendahuluan dan beberapa sub-bab yaitu
 - 1.1 Alasan pemilihan judul.
 - 1.2 Latar belakang.
 - 1.3 Rumusan masalah.
 - 1.4 Tujuan penelitian.
 - 1.5 Manfaat penelitian.
 - 1.6 Sistematika bab.
2. Bagian II merupakan tinjauan Pustaka yang terdiri dari beberapa bagian yakni:
 - 2.1 Landasan teori yang dipakai penulis untuk menjawab rumusan masalah
 - 2.2 Penelitian terdahulu, sebagai alternatif bagi penulis untuk membantu menulis penelitian ini.
 - 2.3 Kerangka pemikiran.
3. Bab III mengenai metodologi penelitian yang didalamnya termasuk:
 - 3.1 Jenis dan Pendekatan penelitian yang digunakan,
 - 3.2 Teknik pengumpulan data
 - 3.3 Teknik analisis data
4. Bagian IV menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan yang akan dibagi menjadi:
 - 4.1 Dampak Perubahan Iklim di Bidang Lingkungan dan Ekonomi bagi Islandia
 - 4.2 Upaya Islandia sebagai Bentuk Komitmennya terhadap UNFCCC

- 4.2.1 Rencana Aksi Iklim
- 4.2.2 Regulasi Mengenai Lingkungan dan Sarana Edukasi
- 4.2.3 Analisis Pencapaian Islandia terhadap Komitmennya
- 5. Bagian V akan membahas mengenai:
 - 5.1 Kesimpulan
 - 5.2 Daftar Pustaka.

